

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. (1990). *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Abdul Wahab, Solichin. (2004). *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Andrayani, Rovi. (2014). *Prosedur Pencairan Dana Belanja Langsung Pada Dinas Marga Provinsi Lampung*. Bandar Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret.
- Banyumas. *Profil Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas*. <http://www.perhubungan.jatengprov.go.id/profil/profil-dinas-perhubungan> dan <http://dinhub.banyumaskab.go.id/>. Diakses pada 19 Mei 2022.
- Banyumas. *Aplikasi Satria Keuangan Kabupaten Banyumas*. <https://satria.banyumaskab.go.id/2022/>. Diakses pada 17 Juni 2022.
- Dwi Ratmono. (2015). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Gunandi. (2008). *Pengertian Pencatatan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim Abdul. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim Abdul. (2004). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim Abdul. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta Salemba Empat.
- Halim Abdul. (2016). *Teori Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hanifah Harsono. (2022). *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Jakarta: Grafindo Jaya.
- Khusaini, Moh. (2018). *Keuangan Daerah*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Kristono, Natal. (2015). *Otonomi Daerah*. Semarang: UNNES Press.
- Luck Ranga Bawono dan Mochamad Novelsyah (2011) PMD 13/2016, pasal 200(1) *ganti uang persediaan*. (Tidak dipublikasikan).
- Mulyadi. (2008). *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyadi. (2013). *Sistem Akuntansi*. (Edisi Ketiga) (Cetakan Keempat). Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyadi. (2016). *Sistem Akuntansi*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Nuridin Usman. (2002). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo, Hal.70.
- Peraturan Bupati Banyumas Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Banyumas.

- Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas.
- Peraturan Bupati Banyumas Nomor 2 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas.
- Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan.
- Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK/05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 190/PMK/05/2012 pada Bab 1 Pasal 1 pengertian pencairan anggaran langsung (LS).
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Rocket. (2019). *Pengertian Akuntansi Pemerintahan* (Tidak dipublikasikan)
- Romnay, M. B., & Steinbert, P.J. (2016). *Sistem Informasi Akuntansi*.
- Sugiono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.
- Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Sumber Pendapatan Daerah.
- Warren, S.Carl. et al. (2005). *Pengantar Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.